



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

OPTIMISME TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI PADA RAPBN 2025

Eka Budiyantri

Analisis Legislatif Ahli Madya
eka.budiyantri@dpr.go.id

Fadila Puti Lenggo Geni

Analisis Legislatif Ahli Pertama
fadila.geni@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran angka 5,2%. Angka ini masih sama dengan APBN 2024 yang menunjukkan pertumbuhan di angka 5,2%. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi daripada Tiongkok (4,7%), Singapura (2,9%), Korea Selatan (2,3%), dan Meksiko (2,24%). Target pertumbuhan ekonomi ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi ASEAN. Ekonomi Asia Tenggara diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,6% pada 2024, serta 4,7% pada 2025, naik dari 4,1% pada 2023. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia. Hanya Vietnam dan Filipina yang pertumbuhan pada kuartal satunya lebih tinggi dari Indonesia, yaitu masing-masing 5,66% dan 5,7%.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, penetapan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2025 dilakukan berdasarkan situasi geopolitik yang masih akan menghantui kondisi perekonomian global. Kondisi perekonomian global yang masih relatif stagnan dan kontribusi konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi yang sangat besar (55%) menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Hal yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga permintaan domestik tersebut adalah menjaga daya beli masyarakat, yaitu melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi kepada masyarakat. Pemerintah juga akan terus berupaya meningkatkan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

Berbeda dengan pandangan pemerintah, beberapa ekonom menyatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terlalu optimis. Hal ini bukan hanya dipengaruhi kondisi global saja, namun juga kondisi domestik di mana terjadi penurunan daya beli dan efektivitas investasi Indonesia. Turunnya daya beli masyarakat setahun terakhir bahkan berdampak pada penerimaan negara. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) mengalami penurunan sebesar 11% secara neto, dengan realisasi mencapai Rp193,06 triliun pada semester I-2024. Begitu juga dengan setoran pajak dari sektor industri perdagangan secara neto turun sebesar 0,8% pada semester I-2024, pada periode yang sama tahun lalu masih mengalami pertumbuhan 7,3%. Pendapatan pajak dari sektor ini hanya mencapai Rp211,09 triliun, meskipun sektor ini tetap menjadi kontributor pajak terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan, dengan porsi 24,79%.

Penurunan efektivitas investasi Indonesia nampak pada pencapaian target investasi yang selalu terpenuhi namun tidak berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Harapan bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan memberikan penguatan ke UMKM, ternyata hanya mengurangi 790 ribu pengangguran dari hampir 8 juta penduduk belum memiliki pekerjaan formal. Realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai

Rp1.418 triliun, sedikit melampaui target, namun hanya menyerap 1,82 juta pekerja. Artinya, setiap Rp1 triliun hanya menyerap 1.081 tenaga kerja, capaian ini jauh lebih rendah dari sepuluh tahun yang lalu. Dalam jangka panjang, penurunan penyerapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat akan berdampak pada perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi.

Atensi DPR

Pertumbuhan ekonomi merupakan kombinasi kegiatan ekonomi yang kompleks baik ekonomi internasional maupun domestik. Kondisi perekonomian global yang stagnan, turunnya daya beli masyarakat serta efektivitas investasi domestik, telah mendorong pemerintah untuk mengupayakan berbagai strategi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Menindaklanjuti hal tersebut, ada beberapa hal yang dapat DPR RI khususnya Komisi XI lakukan. *Pertama*, Komisi XI DPR RI perlu mendukung upaya pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan. *Kedua*, melalui fungsi pengawasan, Komisi XI DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk fokus pada program dan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama menjaga daya beli masyarakat. *Terakhir*, Komisi XI DPR RI juga perlu mendorong penguatan ekonomi domestik dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas investasi.

Sumber

bisnis.tempo.co, 18 Agustus 2024;
cnbcindonesia.com, 11 Juli 2024;
ekon.go.id, 5 Agustus 2024;
kontan.co.id, 19 Agustus 2024;
Media Indonesia, 16 Agustus 2024;
satu.tempo.co, 31 Juli 2024;
tribunnews.com, 18 Agustus 2024.

Minggu ke-3 Agustus
(12 s.d. 18 Agustus 2024)

2024



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.